

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan negara demokrasi, salah satu bentuk upaya negara dalam menjalankan praktik demokrasi melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dalam menentukan wakil-wakilnya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif juga sebagai sarana ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Kehidupan berdemokrasi menjadi jauh lebih baik, rakyat dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang sangat dibatasi pada Orde Baru.

Dalam demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum yang teratur, bebas dan adil, serta kompetitif, tidak ada unsur paksaan, apalagi secara berlebihan dari negara kepada rakyat, yang artinya rakyat memilih pemimpinnya secara bebas, menurut hati nuraninya, tanpa tekanan dan campurtangan serta politisasi dari pihak-pihak tertentu. Namun kenyataannya, di Indonesia dalam menentukan pesta demokrasi masih didominasi oleh pengaruh primordialisme, pengaruh ini masih sangat kuat sehingga para kandidat yang menggunakan cara pendekatan primordialisme dipastikan mampu meraih suara yang signifikan. Kekerabatan, kesukuan mampu mengubah pilihan seseorang yang telah mempunyai pilihan sebelumnya karena faktor primordial. Kompetisi pilkada yang berbasis sentimen bersifat primordial ini dapat menurunkan kualitas proses

demokrasi. Dampak dari menguatnya sentimen yang bersifat primordial adalah menjadi tidak bernilainya kerja dan kinerja, ini membuktikan sebagian besar rakyat dan elit masih mengandalkan isu primordial dalam pesta demokrasi yang sebenarnya telah didukung oleh variabel-variabel demokrasi yang rasional.

Di Indonesia sendiri menganut demokrasi berdasarkan Pancasila, dalam taraf perkembangannya mengenai sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan¹. Demokrasi Indonesia memberikan otonomi yang luas kepada warga Negara tercermin dari adanya upaya untuk membawa individu itu terlibat secara langsung didalam proses politik.

Dengan demikian, lahirnya pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu langkah maju dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis². Pemilihan kepala daerah langsung ini juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya. Hal ini terlihat jelas setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan bahwa Pemilihan kepala daerah (bupati, walikota, dan gubernur) dipilih langsung oleh rakyat. Dimana rakyat pun diberi kesempatan untuk dapat

¹ Prof. Miriam Budiardjo, (*Edisi Revisi*) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2008, Hal 106

² Joko. J Prihatmoko, *Pilkada Secara Langsung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hal. 21

memilih secara langsung Bupati dan wakilnya dengan pertimbangan-pertimbangan dari masing-masing pemilih.

Implementasi demokrasi langsung itu juga terwujud dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2013. Dalam pemilukada di Bolmut terdapat empat pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol yang terdiri dari:³

- 1) Pasangan Drs. Hi. Depri Pontoh - Suriansyah Korompot, SH yang didukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- 2) Pasangan Hamka, SH, MAP - Fellix Andri Mende. ST yang didukung enam partai yakni, Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Republika Nusantara (PRN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Matahari Bangsa (PMB).
- 3) Pasangan Karel Bangko, SH - Moh. Irianto Cristopel Buhang, S.Sos didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR).
- 4) Pasangan Drs. Hi. Hamdan Datunsolang, MM - Farid Lauma, SE yang didukung Partai Amanat Nasional (PAN).

Dengan sistem Pilkada langsung yang berlangsung di Bolmut, sebelum berjuang mendapat dukungan dari masyarakat, setiap pasangan calon harus

³ <https://bolmutpost.com/kpud-tetapkan-cabup-dan-cawabup-pilkada-bolmut-2013/2013/03/19/>, di akses pada tanggal 23 februari 2016 pukul 12:01

terlebih dahulu berusaha merebut dukungan Partai Politik sebagai kenderaannya untuk maju dalam Pilkada Bolmut 2013. Setelah mendapat dukungan Partai Politik, baru kemudian dalam Pilkada langsung setiap pasangan calon harus berusaha merebut dukungan masyarakat untuk dapat memenangkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Bolmut tahun 2013.

Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini sangat menarik untuk dicermati. Karena pasangan yang muncul bukan hanya tiga, tetapi empat. Yaitu, pasangan Depri Pontoh-Suriansya Korompot, Hamka-Felix, Karel Bangko-Cristopel Buhang, dan pasangan Hamdan Datunsolang-Farid Lauma. Tiga pasangan lainnya merupakan asli Putra Daerah Bolmut. Sedangkan pasangan Hamka-Felix kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena merupakan figur baru, dan kurang beredar dalam pemberitaan maupun survei. Dengan banyaknya masyarakat Bolmut yang merupakan pemilih potensial, maka tidak salah bila para pasangan kandidat berjuang keras untuk bisa mendapatkan dukungan mayoritas.

Dalam konteks Bolaang Mongondow Utara orientasi kandidat diyakini berpengaruh besar terhadap pasangan calon Bupati dan Waki Bupati, hal ini disebabkan karena setiap pasangan calon berinteraksi langsung dengan pemilih. Namun pasangan kandidat yang bertarung tersebut perlu memahami ciri khas kehidupan masyarakat yang ada, dalam arti bisa membaca situasi masyarakat dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya masyarakat agar bisa menarik hati pemilih. Karena setiap masyarakat memiliki budayanya dan pengaruh budaya pada perilaku konsumen beragam dari satu negara ke negara lain. Kegagalan menyesuaikan diri dengan perbedaan itu akan menghasilkan

pemasaran yang tidak efektif. Karena pemasaran internasional harus memahami budaya di tiap-tiap daerah pasar internasional dan mengadaptasikan strategi pemasaran dengan budaya itu.

Atas hal tersebut, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolmut dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Depri Pontoh dan Suriansya Korompot atau disingkat DP-SYAH, Depri Pontoh awalnya sebagai wakil Bupati dari Hamdan Datunsolang berhasil menduduki jabatan Bupati di Bolaang Mongondow Utara. Kemudian beliau dilantik pada tanggal 5 September 2013 hingga sekarang sebagai Bupati Bolmut.

Pemilihan kapala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013 lalu, tentunya tidak terlepas dari kultur masyarakat Bolmut itu sendiri, dimana peran ketokohan masi merupakan syarat utama menjadi seorang pemimpin yang dihormati pada masyarakat, dimana ketokohnya masih mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, tidak heran kemenangan Depri Pontoh-Suriansya Korompot pada pemilukada tahun 2013 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, khususnya di kecamatan Bolangitang Barat dapat diduga karena faktor ketokohan pasangan calon Depri Pontoh-Suriansya Korompot yang sudah dikenal oleh kalangan masyarakat. Selain itu, salah satu faktor yang mempengaruhi pasangan ini kemungkinan besar dikarenakan Depri Pontoh asli putr kelahiran Bolangitang jadi figure Depri Pontoh banyak dikenal masyarakat Bolangitang. Bisa juga masyarakat percaya terhadap beliau karena pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Bolmut, dan juga penduduknya mayoritas adalah etnis Bolangitang dan ini memungkinkan. Tidak

cukup sampai disitu peran Partai Politik juga mempunyai pengaruh yang besar, dimana Partai Politik yang menentukan pasangan calon.

Oleh karena itu, dengan adanya Pilkada ini maka rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada secara langsung. Pemberian suara atau *voting* secara umum dapat diartikan sebagai, “Sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsensus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil”.⁴ Pemberian suara dalam Pilkada secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Demikian pula, pemberian suara tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan perilaku lebih tepatnya perilaku pemilih. Perilaku pemilih sendiri menurut *Ramlan Surbakti*⁵ ialah :

“aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilu maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.

Secara umum perilaku pemilih tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diuraikan dari tiga pendekatan yaitu, pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilu, yaitu: *Pertama*,identifikasi partai, dimana semakin solid dan mapan suatu partai politik maka akan memperoleh

⁴ Gosnel F Horald. *Ensyclopedia Of The Social Science*. New York : Mc Grew Hill Book Company. Hal 32

⁵ Efriza, *POLITICAL EXPLORE Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung :Alfabeta, 2012, Hal 480

dukungan yang mantap dari para pendukungnya. Sebaliknya kondisi partai politik yang buruk akan mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap partai politik yang bersangkutan. Begitu pula dalam pilkada secara langsung, dimana pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang didukung oleh partai politik yang solid dan mapan akan mendapat dukungan dari pendukung dan sipatisan partai tersebut. *Kedua*, kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Biasanya yang akan dijual adalah isu keamanan dan keberhasilan yang telah mereka raih. *Ketiga*, penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat. Faktor lain yang turut mempengaruhi perilaku pemilih adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, sejumlah hal perlu diketahui oleh para calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang akan bertarung di daerah, mengenai perilaku pemilih. Pemilih merupakan penentu atau pemegang kekuatan tertinggi dalam pemilihan kepala daerah. Perlu dibangun pendekatan yang baik agar mendapat simpati atau dukungan dari para pemilih. Akan tetapi janganlah pemilih dijadikan objek politik, dengan hanya membangun hubungan pada saat kampanye saja. Tetapi seharusnya pemilih sebagai subjek politik, dan kontestan sebagai pelayan serta agen pembaharuan dalam masyarakat. Pada kenyataanya, hubungan antara kontestan dengan pemilih begitu kerap dengan penghianatan.

Setelah memenangkan pemilu, mudah sekali kontestan melupakan janji dan harapan politik yang telah mereka umbar dihadapan para pemilih. Mereka hanya mengurus distribusi kekuasaan untuk mengamankan posisi yang telah didapat. Sementara itu, pemilih juga kerap kali berpindah-pindah dukungan dari

kontestan yang satu ke kontestan yang lain. Hal ini terjadi bila pemilih melihat bahwa kepala daerah yang terpilih ternyata tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara baik dan bertanggung jawab kepada rakyat, maka rakyat akan memberikan sanksi tidak akan memilih kembali pada pilkada berikutnya.

Dengan adanya pemilihan kepala daerah ini diharapkan rakyat terlibat langsung dalam menentukan siapa yang layak memperjuangkan aspirasi dan dapat memenuhi kepentingan rakyat tanpa campur tangan serta politisasi dari pihak-pihak tertentu. Serta tumbuhnya kesadaran bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya. Termasuk dalam kesadaran ini adalah kehati-hatian dalam menentukan pilihan, sebab kesalahan memilih dapat membawa akibat buruk terhadap kehidupan lima tahun kedepan.

Setela penulis melakukan observasi awal pada lokasi penelitian, terdapat permasalahan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara 2013 di Kecamatan Bolangitang Barat, yakni masyarakat Bolangitang Barat dalam menentukan kepala daerah di kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung memilih berdasarkan lingkungan sosial, serta berorientasi pada isu-isu kandidat yang berkembang.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti “ *Perilaku Pemilih Masyarakat Bolangitang Barat Pada Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Utara Periode 2013-2018* “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perilaku pemilih masyarakat bolangitang barat pada Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Utara Periode 2013-2018
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat bolangitang barat pada pemilihan bupati bolaang mongondow utara periode 2013-2018

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- c. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pemilih masyarakat bolangitang barat pada Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Utara Periode 2013-2018
- d. Dapat mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat bolangitang barat pada Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Utara Periode 2013-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan dalam kajian ilmu politik khususnya untuk

mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pkn dan juga mahasiswa lainnya yang tertarik dengan bidang politik. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sarana berpikir kritis dalam pembelajaran perilaku pemilih masyarakat dalam pemilu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi. Pkn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana tolak ukur untuk berpikir secara ilmiah dan berpikir kritis bagi peneliti dalam mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk memberikan kontribusi pemikiran atau bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan-kebijakan mengenai pendidikan politik dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi masyarakat supaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada umumnya dan Masyarakat Bolangitang Barat pada khususnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya terutama pada masyarakat Kecamatan Bolangitang Barat tentang perilaku pemilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah secara langsung.